

**MODEL INTELLECTUAL CAPITAL SEKTOR PUBLIK:  
UPAYA MENUJU PELAPORAN BARU SEKTOR PUBLIK**

**Partiwi Dwi Astuti**

STIE Triatma Mulya-Bali

[partiwi\\_astuti@yahoo.co.uk](mailto:partiwi_astuti@yahoo.co.uk)

**Ida Ketut Kusumawijaya**

STIE Triatma Mulya-Bali

[idaketut\\_kusumawijaya@yahoo.co.id](mailto:idaketut_kusumawijaya@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Ketidakkampuan sistem pelaporan keuangan saat ini untuk menjelaskan sumber daya baru seperti hubungan yang secara internal digerakan oleh aset dan pengetahuan, menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas model *intellectual capital* sektor publik sebagai upaya menuju pelaporan baru sektor publik yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Meskipun para peneliti telah mengembangkan model *intellectual capital* beserta instrumen untuk mengukur dan mengelola aset tidak berwujud pada sektor privat, seperti MCM, ROA, DIC, dan SC, namun masih terdapat kesulitan untuk mengaplikasikannya di sektor publik, karena sasaran entitas administrasi publik berbeda dengan sasaran sektor privat. Hingga saat ini belum ada peneliti yang membahas mengenai bagaimana pelaporan *intellectual capital* disusun. Beberapa model *intellectual capital* sektor publik yang diajukan para peneliti seperti *intellectual capital general model*, model *intellectual capital* yang berdasarkan pada *European Foundation Quality Management Model (EFQM)*, *intangible assets statement*, dan model *intellectual capital* yang diajukan Bossi (2003), baru membahas tentang model yang mengukur *intellectual capital* sektor publik.

Kata kunci: model, *intellectual capital*, sektor publik, pelaporan, penelitian kepustakaan

**1. Pendahuluan**

Saat ini, organisasi sektor publik sedang memperoleh banyak sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan sektor publik. Berbagai tuntutan diajukan terhadap pertanggungjawaban organisasi sektor publik atas kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Oleh karenanya reformasi organisasi sektor publik perlu dilakukan. Reformasi ini merupakan bagian dari proses untuk mulai dilaksanakannya prinsip-prinsip filosofi manajemen baru yang disebut sebagai manajemen publik baru (*new public management=NPM*) (Hodges and Mellet, 2002; Mouritsen and Thorbjornsen, 2004; Carlin et al, 2005). NPM menuntut organisasi sektor publik untuk dapat mengembangkan dan mengelola aset tidak berwujudnya, khususnya *intellectual capital*.

Pada organisasi sektor publik, manfaat yang diberikan kepada masyarakat kebanyakan dibangun oleh aset tidak berwujudnya (Del Bello, 2006), sehingga aset tidak berwujud akan menjadi sumber utama keunggulan kompetitif organisasi sektor publik. Termasuk dalam aset tidak berwujud tersebut, antara lain *skill*, kompetensi, prosedur, dan sistem informasi yang dapat dikendalikan oleh organisasi, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesejahteraan publik, kualitas hidup, maupun perlindungan bagi lingkungan dan reputasi suatu wilayah. Pengelolaan aset tidak berwujud dalam organisasi sektor publik memperoleh perhatian tersendiri, karena sebagian besar sasaran strategik bersifat tidak berwujud dan merupakan faktor kunci untuk mencapai sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Berbeda dengan organisasi sektor privat yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai moneter bagi pemegang saham, pada organisasi sektor publik banyak aktivitas yang tidak dapat dikuantifikasikan secara moneter, karena sebagian besar input dan outputnya bersifat tidak berwujud. Hal tersebut mengakibatkan keefektifan aktivitas organisasi sektor publik sulit dianalisa dan dievaluasi secara moneter sesuai ketentuan yang berlaku pada akuntansi sektor publik saat ini. Para akademisi dan praktisi mengakui bahwa dalam ekonomi berbasis pengetahuan, informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan tradisional tidak cukup untuk dapat merespon permintaan *stakeholder* internal maupun eksternal untuk menghasilkan laporan yang lebih komprehensif (Del Bello, 2006). Hal ini disebabkan karena terdapat keterbatasan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan yang ada saat ini, seperti sifatnya yang umum, kuantitatif, historis, dinyatakan dalam unit moneter, serta sarat dengan taksiran.

Meskipun disadari memiliki peran penting bagi organisasi sektor publik, namun masih sulit menemukan organisasi sektor publik yang menyajikan *intellectual capitalnya* dengan cara spesifik. Sejumlah penelitian telah memfokuskan pelaporan *intellectual capital* pada organisasi sektor privat, namun penelitian yang berfokus pada pelaporan *intellectual capital* sektor publik masih sulit ditemukan. Padahal pelaporan *intellectual capital* sektor publik memegang peran penting bagi organisasi sektor publik untuk menyajikan informasi kepada *stakeholder* sehingga *stakeholder* akan dapat mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## **2. Rumusan Masalah/Tujuan Penelitian**

Keterbatasan pelaporan keuangan saat ini, seperti sifatnya yang umum, kuantitatif, historis, dinyatakan dalam unit moneter, serta sarat dengan taksiran menyebabkan pelaporan keuangan saat ini yang berlaku pada organisasi sektor publik belum dapat berperan secara penuh untuk memenuhi berbagai kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 25 tersebut. Ketiadaan standar akuntansi yang mengatur penyajian *intellectual capital*, khususnya pada organisasi sektor publik menyebabkan organisasi sektor publik mengalami kesulitan ketika akan menyajikan nilai tersebut kepada *stakeholder*. Padahal manfaat organisasi sektor publik kebanyakan dibangun oleh aset tidak berwujudnya. Akibatnya, nilai yang terkandung dalam *intellectual capital* sektor publik tidak diketahui oleh para *stakeholder*, bahkan seringkali organisasi sektor publik sendiri tidak menyadari dan mengetahui bahwa nilai tersebut merupakan sumber utama keunggulan kompetitif bagi organisasi sektor publik.

Menyikapi adanya keterbatasan pelaporan keuangan saat ini, penelitian ini secara umum bertujuan untuk membahas model *intellectual capital* sektor publik sebagai upaya menuju pelaporan baru sektor publik yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja sektor publik.

## **3. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai obyek studi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan (*rule*) yang mengikat obyek ilmu beserta profesinya. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sesuatu masalah yang menjadi topik penelitian atau konsepsi tersebut. Pendekatan ini sangat sesuai untuk kondisi Indonesia karena masih terbatasnya perusahaan yang mengimplementasikan *intellectual capital*.

## **4. Analisis dan Diskusi**

### **4.1. *Intellectual Capital* Organisasi Sektor Publik**

Sektor publik memiliki sasaran organisasi dan memberikan pelayanan yang bersifat tidak berwujud, menggunakan beberapa sumber daya tidak berwujud, serta menggunakan aset tidak berwujudnya dengan cara yang berbeda dengan sektor privat (Cinca et al, 2003). Proses inovasi manajemen dalam sektor publik cenderung lebih lambat jika dibandingkan

dengan sektor privat, namun dalam kaitannya dengan *intellectual capital*, sektor publik dapat lebih cepat mengadopsi praktik pengukuran dan pencatatan aset tidak berwujud dibandingkan dengan sektor privat (Cinca et al, 2003). Hal tersebut disebabkan sumber daya yang digunakan sektor publik kebanyakan tidak berwujud dan sebagian besar output sektor publik juga berupa pelayanan yang memiliki sifat tidak berwujud. Ketiadaan kompetisi dan adanya cenderung monopolistik, menyebabkan stimulasi untuk mengembangkan praktik pengukuran dan pencatatan baru masih jauh dari yang diharapkan.

Secara umum, sasaran organisasi sektor publik kebanyakan bersifat tidak berwujud, seperti menciptakan keamanan lingkungan, menaikkan tingkatan budaya dari sebuah populasi, atau memberikan rasa keadilan, jika dibandingkan dengan sasaran organisasi sektor privat yang lebih didominasi oleh pencapaian profitabilitas dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan kualitas terbaik kepada pengguna, sehingga kinerja sektor publik tidak diukur dari analisis rasio keuangan atau nilai saham. Dalam organisasi sektor privat, tanggungjawab sosial dan fokus pada lingkungan dilakukan untuk memperbaiki citra organisasi, sedangkan dalam organisasi sektor publik, komitmen terhadap hal tersebut tidak digunakan untuk perbaikan citra, namun merupakan sasaran fundamental bagi organisasi sektor publik. Tingkat pengendalian dan transparansi manajemen yang lebih tinggi diperlukan dalam organisasi sektor publik dibanding sektor privat.

Dalam organisasi sektor publik, kebutuhan untuk mengkuantifikasi sebuah informasi lebih sedikit dibanding sektor privat. Organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan informasi yang memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, antara lain informasi mengenai kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang, informasi mengenai pengendalian manajemen, rencana yang akan datang, serta indikator ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Dalam konteks *intellectual capital*, organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan informasi mengenai usaha-usaha untuk mengoptimalkan *intellectual capital* di internal organisasi, meningkatkan citra organisasi, dan menilai kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat atau lingkungan. Hal ini tidak terjadi di sektor privat. Survey yang dilakukan Andersen (1998) terhadap 368 manajer sektor privat menunjukkan bahwa mereka tidak memasukan informasi *intellectual capital* dalam laporan keuangan. Dalam sektor privat, *intellectual capital* digunakan hanya sebagai salah satu alat internal manajemen.

*Review* literatur yang dilakukan Kaufmann dan Schneider (2004) menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan mengenai istilah atau definisi *intellectual capital*. Bounfour (2003) menyatakan bahwa para peneliti dan analis belum memperoleh kesepakatan mengenai

definisi dari investasi tidak berwujud beserta elemen pembentuknya. Tabel 1 menunjukkan sejumlah definisi *intellectual capital* yang menggambarkan kesulitan para peneliti ketika menentukan elemen *intellectual capital*.

Tabel 1  
Definisi *Intellectual Capital*

Peneliti	Definisi
Roos, Roos, Dragonetti, dan Edvinsson (1997)	<i>Intellectual capital</i> diklasifikasikan sebagai <i>structural capital</i> dan <i>human capital</i> , <i>thinking</i> dan <i>non-thinking assets</i> . Peneliti membuat perbedaan utama terhadap premis bahwa <i>human capital</i> memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda dari jenis modal lainnya.
Sveiby (1997)	<i>Intellectual capital</i> meliputi <i>invisible asset</i> organisasi yang terdiri dari: kompetensi pegawai ( <i>skill</i> , pendidikan, dan pengalaman) dan kapasitasnya untuk bertindak dalam berbagai situasi; struktur internal (manajemen, struktur paten, konsep, model, kapabilitas penelitian serta pengembangan dan software); dan struktur eksternal (nama baik, merk, hubungan dengan pelanggan dan pemasok).
Stewart (1997)	<i>Intellectual capital</i> didefinisikan sebagai materi intelektual-pengetahuan, informasi, <i>intellectual property</i> , dan pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan.
Brooking (1996)	<i>Intellectual capital</i> terdiri dari manusia, sistem, dan komponen pasar.
Edvinsson dan Malone (1997)	Pegawai dan manajer dalam organisasi menggambarkan <i>human capital</i> . <i>Human capital</i> diartikan sebagai apa yang dapat pegawai lakukan baik secara individu maupun kelompok. Komponen sistem menggambarkan pengetahuan dalam perusahaan yang independen dari pegawai, yang meliputi paten, kontrak-kontrak, database, dan teknologi informasi dan produksi. Komponen pasar meliputi hubungan antara organisasi dengan pihak diluar organisasi misalnya dengan pemasok, distributor dan pelanggan.
Kaplan dan Norton (1992) Sullivan (1999)	Komponen <i>intellectual capital</i> dari <i>balanced scorecards</i> terdiri dari tiga perspektif yang dihubungkan dengan pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. <i>Intellectual capital</i> adalah pengetahuan yang dapat diubah menjadi laba, yang terdiri dari dua elemen, yaitu <i>human capital</i> dan <i>intellectual asset</i> . <i>Human capital</i> terdiri dari pegawai perusahaan yang memiliki <i>skill</i> , kemampuan, pengetahuan dan <i>know-how</i> . Pegawai adalah "unit" individual dari <i>human capital</i> yang harus ditempatkan dengan atribut-atribut yang dapat digunakan secara efektif. Dalam tiap pegawai terdapat pengetahuan yang bersifat <i>tacit</i> (tidak dapat dikodifikasikan) untuk digunakan. <i>Intellectual assets</i> diciptakan saat <i>human capital</i> dapat dikodifikasikan. Pada titik ini perusahaan dapat mentransfer <i>intellectual asset</i> kepada individu lainnya setiap saat diperlukan.
Mayo (2000)	Peneliti memfokuskan pada definisi <i>human capital</i> dan mendefinisikannya sebagai kapabilitas, pengetahuan, <i>skill</i> , pengalaman, dan jaringan dengan kemampuan untuk mencapai hasil dan potensi untuk tumbuh; motivasi individual dalam bentuk aspirasi, ambisi, mengarahkan, motivasi kerja dan produktivitas; keefektifan kelompok kerja dalam bentuk dukungan, saling menghormati untuk berbagi dan nilai-nilai; kepemimpinan dalam bentuk kejelasan visi dan kemampuan untuk mengkomunikasikan visi; iklim organisasional dalam bentuk budaya, khususnya kebebasan untuk berinovasi, keterbukaan, fleksibilitas dan rasa hormat untuk tiap individu.
Haanes dan Lowendahl (1997)	Perbedaan yang dibuat antara sumber daya <i>intangible</i> kompetensi dan hubungan. Kompetensi dikonseptualisasikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang dimanifestasikan pada level individu dan organisasional. Hubungan merupakan jenis <i>intellectual capital</i> yang dimanifestasikan dalam reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan. Keduanya ada dalam individu dan kelompok.

Sumber: Schneider dan Samkin (2008)

Sebagian besar definisi *intellectual capital* berusaha memasukan pengetahuan organisasi dan mengakui bahwa *intangible* dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan definisi aset yang ditentukan oleh standar akuntansi. *Intellectual capital* kemudian dapat digambarkan sebagai nilai yang dihasilkan dari sumber daya yang secara konvensional tidak ditemukan dalam neraca (Mouritsen et al, 2005; Sveiby, 1997). *The Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD* (1999) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai nilai ekonomis dari dua kategori aset tidak berwujud, yaitu 1). *organizational (structural) capital*, dan 2). *human capital*. *Structural capital* selanjutnya dipisahkan ke dalam modal internal dan eksternal. Definisi tersebut didukung Edvinsson dan Malone (1997), Kaplan dan Norton (1992), Rodgers (2003), Roos et al (1997), Stewart (1997), serta Sveiby (1997) yang memisahkan *intellectual capital* ke dalam tiga dimensi, yaitu *external capital*, *internal capital*, dan *human capital*.

Perbedaan sasaran organisasi sektor privat dan sektor publik menyebabkan elemen *intellectual capital* dari kedua sektor tersebut berbeda. Misalnya, *customer capital (external capital)* dalam organisasi sektor privat diukur dari nilai *goodwill* dan nama dagang. Dalam organisasi sektor publik yang disebut dengan pelanggan berbeda dengan organisasi sektor privat, karena ketiadaan kompetisi dan adanya fakta bahwa biasanya pelanggan tidak memiliki pilihan lain. Jenis indikator seperti persentase pelanggan yang hilang tidak dapat dihitung dalam organisasi sektor publik. Tidak terdapat nama dagang pada organisasi sektor publik, meskipun citra merupakan hal penting. *Human capital* dan *structural capital* organisasi sektor publik memiliki kekhasan, karena pegawai organisasi sektor publik merupakan pegawai pemerintah dengan budayanya tersendiri. Kebutuhan transparansi dalam manajemen merupakan perhatian utama organisasi sektor publik.

Aset tidak berwujud yang relevan di dalam organisasi sektor publik ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2

Klasifikasi Aset Tidak Berwujud Sektor Publik

<i>Internal Organization</i>	<i>External Structural Capital</i>	<i>Human Capital</i>	<i>Social and Environmental Commitment</i>
Kemampuan inovasi	Layanan	Keharmonisan pegawai	Komitmen sosial
<i>Know-how</i>	Citra	Pelatihan rutin	Komitmen lingkungan
Structural organization	Transparansi	Pemeliharaan pegawai	
Budaya perusahaan			
Komunikasi			

Sumber: Cinca et al (2003)

#### **4.2. Pentingnya Pelaporan *Intellectual Capital* Sektor Publik**

*Intellectual capital* diakui sebagai sumber daya penting yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Chen, 2008; Kong and Prior, 2008; Schiuma and Lerro, 2008). Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, pengetahuan organisasi adalah paling penting (Kong and Thompson, 2009). *Intellectual capital* menggambarkan kumpulan pengetahuan yang melekat pada pegawai, rutinitas organisasi dan hubungan dengan jaringan organisasi (Stewart, 1997; Bontis, 2002; Kong, 2008). Akhir-akhir ini organisasi sektor publik telah menunjukkan respon yang lebih baik terhadap kebutuhan pengguna layanan, menekankan pada kinerja dan manajemen hasil, mulai menggunakan standar kinerja, mengkomunikasikan dengan lebih baik atas hasil yang dicapai, melakukan desentralisasi dan delegasi kompetensi keuangan dan manajemen individu, minat pada kekuatan pasar dan penciptaan pasar internal, privatisasi organisasi publik dan menerapkan metode manajemen sektor privat (*European Foundation for Quality Management (EFQM), 1997*). Hal tersebut menuntut perlunya menyusun sebuah sistem yang mudah dipahami bagi seluruh elemen tidak berwujud yang dapat membedakan sumber keunggulan kompetitif yang menghasilkan atau akan menghasilkan nilai, seperti fokus pada anggota masyarakat, tanggungjawab sosial dan profesionalisme staf (Garcia, 2001).

Perlunya membangun sistem baru tersebut disebabkan karena saat ini sistem pelaporan keuangan tidak mampu menjelaskan sumber daya baru seperti hubungan yang secara internal digerakan oleh aset dan pengetahuan (Mouritsen et al, 2004). Padahal pada organisasi sektor publik, *intangibility* seringkali lebih dominan dibanding pada organisasi sektor privat, yang disebabkan (Serrano et al, 2003), karena 1). administrasi publik cenderung memiliki tujuan ganda yang bersifat non keuangan, 2). diantara sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, pengetahuan, modal, bahan baku dan mesin, entitas administrasi publik secara intensif menggunakan dua jenis sumber daya yang pertama yang bersifat tidak berwujud, dan 3). produk akhir dari administrasi publik adalah jasa yang memiliki sifat tidak berwujud. Selain itu organisasi sektor publik selalu intensif dengan *human capital* dan berfokus pada keluaran yang memiliki sifat tidak berwujud (Wall, 2005). Oleh karenanya, maka perlu bagi organisasi sektor publik untuk menerapkan model pelaporan *intellectual capital* karena dengan mengidentifikasi, menilai dan mengelola *intellectual capital*, akan dapat mendukung tercapainya keberhasilan organisasi sektor publik, memperbaiki pengambilan keputusan, dan dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kualitas proses manajemen kepada publik (Ramirez, 2010). Pendekatan *intellectual capital* dapat membantu memfasilitasi proses pembelajaran dalam organisasi sektor publik karena

memberikan kekuatan manajer publik untuk memikirkan kembali misinya (Kong and Thompson, 2006). Di samping itu, *intellectual capital* juga memberikan kekuatan kepada manajer publik untuk mengetahui apa yang diketahui (*know-what*) dan kemampuan untuk memberikan yang diketahuinya (*know-how*). Hal ini penting bagi organisasi sektor publik karena organisasi sektor publik harus belajar pengetahuan baru dan meniadakan pengetahuan yang tidak diperlukan dalam organisasi yang telah berubah (Kong, 2009).

Namun demikian, aliran nilai yang begitu besar dari *intellectual capital* bagi organisasi sektor publik tersebut seperti pengetahuan, proses internal, struktur bernilai tambah penting dalam hubungannya dengan pihak eksternal tidak dipertimbangkan lebih jauh dalam neraca yang dihasilkan oleh akuntansi sektor publik tradisional. Akibatnya neraca beserta dengan instrumen-instrumen pengendaliannya dirasakan telah kehilangan nilainya. Ketidakmampuan sistem pelaporan keuangan dalam menjelaskan sumber daya baru tersebut dikarenakan, standar akuntansi yang saat ini ada belum mampu menangkap dan melaporkan investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh seluruh sumber daya non fisik, termasuk *intellectual capital*.

Pendekatan akuntansi tradisional tidak memberikan identifikasi atas aset tak berwujud baru (Guthrie and Petty, 2000b) seperti kompetensi pegawai, hubungan dengan pelanggan, sistem administrasi, database dan sistem pendukung keputusan yang merupakan penggerak nilai dalam organisasi berbasis pengetahuan. Dalam akuntansi tradisional, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai moneter akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Hal tersebut menyebabkan hingga saat ini, *intellectual capital* yang merupakan *intangible* baru dalam organisasi sektor publik belum dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tradisional karena belum memenuhi definisi aset dalam akuntansi. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 90 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Ketiadaan kesepakatan mengenai bagaimana mengukur nilai *intellectual capital* dengan andal, menyebabkan *intellectual capital* belum dapat disajikan dalam laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi akuntansi tradisional hanya dapat melaporkan realisasi transaksi masa lalu dan bersifat *backward looking information*. Padahal untuk dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus bersifat *forward looking information* dan dapat digunakan untuk memprediksi masa depan sebuah organisasi. Kegagalan untuk melaporkan *intangible* karena keterbatasan akuntansi

tradisional telah menimbulkan minat diantara *stakeholder* organisasi sektor publik untuk melihat informasi di luar informasi keuangan, khususnya aset tidak berwujud dalam bentuk *intellectual capital*. Hal tersebut sangat beralasan karena *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 8* menyatakan bahwa laporan akuntansi bertujuan umum tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi yang diperlukan oleh *stakeholder*, oleh karenanya *stakeholder* dapat menggunakan informasi dari sumber lainnya.

Uraian di atas menunjukkan kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi, *intellectual capital* merupakan sumber daya penting organisasi sektor publik yang diperlukan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Di sisi lain, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang saat ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan sektor publik tidak memungkinkan untuk melaporkan *intellectual capital* dalam laporan keuangan. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan pentingnya *intellectual capital* bagi organisasi sektor publik, maka *intellectual capital* perlu disajikan dalam laporan *intellectual capital* tersendiri, terpisah dari laporan keuangan tradisional yang disampaikan kepada para *stakeholder* yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan evaluasi kinerja sektor publik. Laporan ini merupakan laporan pelengkap yang bersifat *voluntary* dari laporan keuangan tradisional yang bersifat *mandatory*. Hal tersebut sesuai dengan SFAC No. 8 yang menyatakan bahwa meskipun penyusun standar akuntansi dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan akan mencari untuk menyediakan serangkaian informasi yang dapat memenuhi kebutuhan *stakeholder* utama, namun memfokuskan pada kebutuhan informasi umum, tidak dapat mencegah entitas pelaporan untuk memasukan tambahan informasi yang dapat bermanfaat bagi *stakeholder* utama.

Berdasarkan uraian di atas, pelaporan *intellectual capital* sektor publik memiliki urgensi karena ketidakmampuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang saat ini ada untuk melaporkan *intellectual capital* dalam laporan keuangan karena belum adanya pengukuran yang andal untuk *intellectual capital*. Padahal pengukuran *intellectual capital* penting untuk dilakukan karena 1). Pengukuran akan memberikan dasar penilaian organisasi, 2). Pengukuran akan menstimulasi perhatian manajemen pada sesuatu yang penting, 3). Pengukuran juga dapat digunakan sebagai justifikasi aktivitas yang berhubungan dengan investasi *intellectual capital* sehingga dapat digunakan untuk meyakinkan manajemen puncak mengenai nilai dan kegunaan *intellectual capital* (Skyrme and Amidon, 1998). Dalam organisasi sektor publik, dengan tidak diungkapkannya investasi dalam aset tidak berwujud akan mengakibatkan asimetri informasi, yaitu terjadi penurunan secara terus menerus

terhadap kegunaan laporan keuangan, karena laporan keuangan yang ada tidak memberikan informasi yang akurat, dan terjadi manipulasi laporan keuangan dengan menggunakan aset tidak berwujud, karena aset tidak berwujud dinilai terlalu rendah di neraca. Keberadaan *intellectual capital* dan aset tidak berwujud merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah, regulator, maupun perusahaan (Mouritsen et al, 2001). Tantangan yang terpenting adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi secara teoritis dan solusi praktek untuk pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tidak berwujud, proses maupun potensi yang hingga saat ini tidak dapat ditelusuri oleh ukuran akuntansi tradisional (Abeysekera, 2006; Ducharme, 1998; Guthrie and Petty, 2000a); van der Meer-Kooistra and Zilstra, 2001).

#### **4.3. Pengukuran *Intellectual Capital* di Organisasi Sektor Publik**

*Survey* literatur dari model *intellectual capital* beserta instrumen untuk mengukur dan mengelola aset tidak berwujud telah dilakukan oleh Bontis et al (1999), sedangkan Sveiby (2000) mengelompokan model *intellectual capital* ke dalam empat kategori: 1). *Market capitalization model (MCM)*, yang menentukan nilai *intellectual capital* atau aset tidak berwujud sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan nilai ekuitas pemegang saham. Salah satu contoh penerapan MCM adalah *Tobin's ratio* yang menentukan nilai *intellectual capital* atau aset tidak berwujud dengan membandingkan antara nilai pasar perusahaan dengan nilai pengganti aset, 2). *Return on assets methods (ROA)*, yang menentukan nilai *intellectual capital* atau aset tidak berwujud dengan membandingkan antara ROA perusahaan dengan rata-rata industrinya. Contoh dari penerapan metode ini adalah *economic value added (EVA)* yang diajukan oleh Stewart (1997), 3). *Direct intellectual capital methods (DIC)*, yang mengestimasi nilai kas dari aset tidak berwujud dengan mengidentifikasi berbagai komponen dan penilaiannya. Contoh penerapan metode ini adalah *technology broker* yang diajukan oleh Brooking (1996) dengan mendasarkan pada jawaban atas 20 pertanyaan *survey* yang memberikan informasi pada empat komponen *intellectual capital* dihubungkan dengan aset pasar, *human capital*, *intellectual property*, dan infrastruktur, dan 4). *Scorecards methods (SC)*, yang mengidentifikasi berbagai komponen aset tidak berwujud dengan serangkaian indikator. Tidak terdapat penilaian secara moneter atas aset tidak berwujud dalam SC. Beberapa penerapan SC antara lain *balanced scorecards* (Kaplan and Norton, 1992), *business navigator* (Edvinsson and Malone, 1997), *intangible asset monitor* (Sveiby, 1997).

Bossi et al (2001) mengemukakan bahwa terdapat kesulitan untuk mengaplikasikan model *intellectual capital* sektor privat ke sektor publik karena sasaran entitas administrasi

publik (memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat dan manajemen yang lebih baik) berbeda dengan sasaran sektor privat (memaksimalkan laba dan menciptakan nilai bagi pemegang saham). MCM, ROA, dan DIC memfokuskan pada penilaian ekonomis sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada organisasi sektor publik, yang dikarenakan tidak dapat ditentukannya nilai pasar organisasi sektor publik. Konsep akuntansi seperti laba operasi, modal kerja, nama dagang, atau *goodwill* tidak berlaku pada organisasi sektor publik atau memiliki makna yang berbeda. Di samping itu, terdapat perbedaan elemen *intellectual capital* sektor privat dengan sektor publik. Misalnya, *customer capital* atau *external structure* dalam sektor privat ditentukan oleh nilai pelanggan dan merek, sedangkan dalam sektor publik, yang menjadi pelanggan adalah masyarakat, yang meskipun secara konsep sama dengan pelanggan pada sektor privat, namun ketiadaan kompetisi atau pilihan bagi masyarakat, kecuali menggunakan jasa sektor publik, menjadikan indikator yang digunakan juga berbeda. Sektor publik tidak mengenal istilah merek, namun yang dikenal adalah istilah citra atau reputasi. *Human* dan *organizational capital* sektor publik menunjukkan karakteristik yang khas, misalnya dalam rekrutmen, promosi pegawai, serta pengelolaan pegawai yang berbeda dengan sektor privat.

Beberapa model manajemen sektor publik dalam definisi indikator aset tidak berwujud hendaknya mengungkapkan pentingnya *intellectual capital* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Model seharusnya menunjukkan bagaimana aset tidak berwujud digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik, menunjukkan relevansi pencapaian keunggulan manajemen, dan seharusnya merefleksikan komitmen organisasi terhadap sosial dan perbaikan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis model sektor privat yang sesuai untuk diterapkan pada organisasi sektor publik adalah yang mendasarkan pada metode SC. Hal ini disebabkan karena SC tidak melakukan penilaian secara moneter untuk aset tidak berwujud, sehingga akan lebih memungkinkan untuk diaplikasikan dalam organisasi sektor publik.

#### **4.4. Model *Intellectual Capital* Sektor Publik**

Ketiadaan konsep pengukuran yang dapat diterima umum, menyebabkan hingga sekarang *intellectual capital* tidak dapat disajikan dalam neraca yang dihasilkan oleh akuntansi sektor publik tradisional. Meskipun masih sulit untuk menemukan organisasi sektor publik yang melakukan pelaporan *intellectual capital*, namun beberapa peneliti telah mengajukan model *intellectual capital* untuk organisasi sektor publik, sebagai berikut:

##### *a. Intellectual Capital General Model*

Model ini diajukan oleh Bueno et al (2003, 2004) dalam proyek SICAP yang didanai oleh *Spanish Ministry of Science and Technology (PROFIT Programme)* dan *European Regional Development Fund (ERDF)* untuk memfasilitasi manajemen pelayanan publik yang efisien dengan mengadopsi *Intellectus Model*. Proyek bertujuan untuk merespon kebutuhan administrasi publik dalam mengidentifikasi dan mengukur sumber daya tidak berwujud yang merupakan sumber utama penciptaan nilai dan membantu menciptakan keberhasilan dan efisiensi pelayanan publik. Model mengidentifikasi *intellectual capital* ke dalam tiga dimensi, yaitu *public human capital*, *public structural capital (public organizational capital, public technological capital, public social capital)*, dan *public relational capital*. Elemen dan variabel *intellectual capital* sektor publik dalam proyek SICAP ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3

Elemen dan Variabel *Intellectual Capital* Sektor Publik dalam Proyek SICAP

Komponen	Elemen	Variabel
<i>Public Human Capital</i>	Sikap dan nilai	Rasa komitmen, motivasi, kepuasan, kemampuan bersosialisasi, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, kreatifitas
	Pengetahuan teknis	Pendidikan formal, pelatihan khusus, pengalaman professional, pengembangan personal
	Kapasitas dan kompetensi	Pembelajaran, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan
<i>Public organizational capital</i>	Budaya	Homogenitas budaya, evolusi nilai budaya, iklim pegawai, filosofi layanan
	Struktur	Desain, struktur pegawai, pengembangan organisasi
	Pembelajaran organisasi	Ruang pembelajaran, rutinitas organisasi, penciptaan dan pengembangan pengetahuan, akuisisi dan difusi pengetahuan
	Proses	Klien internal, klien eksternal, refleksi strategik, inovasi
<i>Public social capital</i>	Kohesi sosial	Filosofi layanan, layanan dan sumber daya sosial, inovasi sosial, kesejahteraan sosial
	Stabilitas sosial	Transparansi, etika, partisipasi masyarakat
	Koneksi sosial	Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan pegawai
<i>Public technological capital</i>	Usaha riset dan pengembangan	Pengeluaran riset dan pengembangan, riset dan pengembangan pegawai, proyek riset dan pengembangan
	Dukungan teknologi	Akuisisi teknologi, dukungan teknologi, dukungan ICT
	Properti intelektual dan industri	Paten, lisensi

<i>Public relational capital</i>	Hubungan dengan provider	Perjanjian dengan provider, dukungan teknologi, layanan ad hoc, fleksibilitas provider
	Aliansi	Dasar aliansi, tingkat komitmen, tingkat kembalian aliansi
	Hubungan dengan media	Citra, <i>media citation</i>

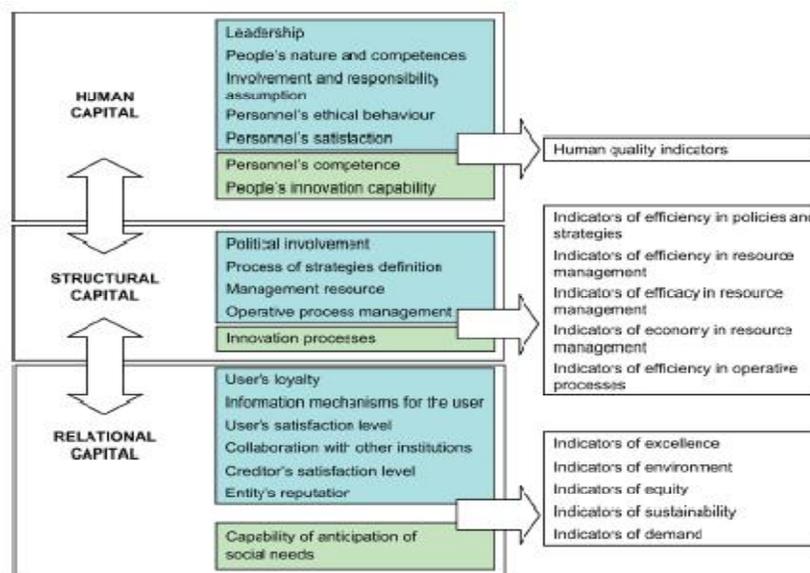
Sumber: Bueno et al (2003)

b. Model *Intellectual Capital* yang Mendasarkan Pada *European Foundation Quality Management Model (EFQM)*

Adanya kebutuhan memasukan sebuah laporan mengenai *intellectual capital* pada organisasi sektor publik, Caba and Sierra (2001) mengajukan model pengukuran *intellectual capital* yang mendasarkan pada *European Foundation Quality Management Model (EFQM)*. Model yang diajukan mengintegrasikan elemen yang berbeda dari EFQM model, ke dalam tiga blok yang membentuk *intellectual capital*, yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital*. Pertimbangannya adalah adanya hubungan langsung diantara ketiganya, karena nilai-nilai publik tergantung pada tingkat kualitas dari ketiga blok tersebut. Model yang diajukan Caba and Sierra (2001) untuk mengukur *intellectual capital* ditunjukkan dalam Gambar 1.

Gambar 1

Model Pengukuran *Intellectual Capital* yang Diajukan Caba and Sierra (2001)



Sumber : Caba and Sierra (2001)

c. *Intangible Assets Statement*

Garcia (2001) mengajukan laporan baru yang disebut *Intangible Assets Statement* dengan bagian non keuangan merupakan investasi tidak berwujud yang selama ini tidak dapat

diakui sebagai aset dalam akuntansi tradisional. Model ini mendasarkan pada *intangible asset monitor* (Sveiby, 1997) dan *intellect model* (Euroforum, 1998). Model menterjemahkan strategi dan misi organisasi sektor publik ke dalam serangkaian indikator yang memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran investasi atau elemen tidak berwujud, yang dapat digambarkan dalam Gambar 2.

Gambar 2

Model Pengukuran Elemen Tidak Berwujud yang Diajukan Garcia (2001)



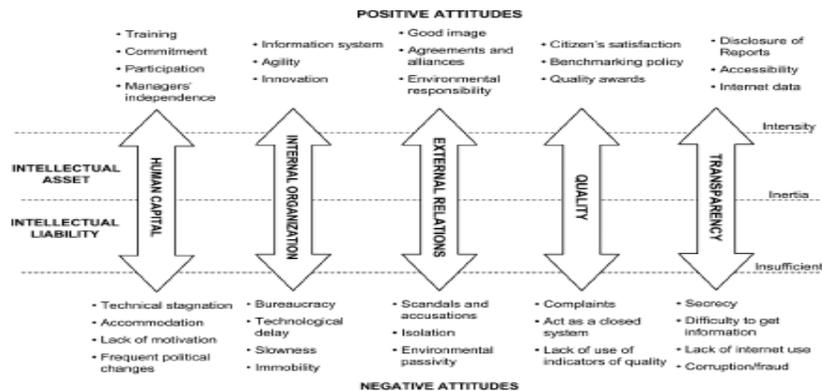
Sumber : Garcia (2001)

d. Model *Intellectual Capital* yang Diajukan Bossi (2003)

Bossi (2003) mengajukan model *intellectual capital* sektor publik dengan menekankan pada lima perspektif, yaitu sumber daya manusia, proses internal, hubungan eksternal, transparansi, dan kualitas. Prinsip dasar model ini adalah bahwa organisasi sektor publik dapat menunjukkan *intellectual capital* positif maupun negatif, tergantung pada praktik dan kebijakan manajemen atas elemen tidak berwujud. Oleh karenanya tiap perspektif *intellectual capital* dapat menunjukkan hal positif yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan *intellectual capital* dan hal negatif yang menghasilkan *intellectual liability*. Model ini juga menentukan tiga tingkatan organisasi sektor publik, yaitu: 1). *Intellectual capital intensity*, jika pengelolaan elemen tidak berwujud sangat baik, 2). *Inertia*, jika pengelolaan elemen tidak berwujud cukup baik, dan 3). *Intellectual capital shortage*, jika pengelolaan elemen tidak berwujud tidak dapat memuaskan masyarakat. Model *intellectual capital* yang diajukan Bossi (2003) ditunjukkan dalam Gambar 3.

Gambar 3

Model *Intellectual Capital* yang Diajukan Bossi (2003)



Sumber: Bossi (2003)

Hingga saat ini, berdasarkan *review* terhadap literatur maupun hasil penelitian, kebanyakan peneliti termasuk Bueno et al (2003, 2004), Caba dan Sierra (2001), Garcia (2001), maupun Bossi (2003) baru membahas tentang model yang mengukur *intellectual capital* sektor publik. Belum ada pembahasan mengenai bagaimana pelaporan *intellectual capital* disusun. Seperti halnya dengan pengukuran *intellectual capital*, pelaporan *intellectual capital* sektor publik juga belum dibuatkan standar khusus. Beberapa peneliti (Bontis, 2000; Sveiby, 1998; Mouritsen et al, 2000; Roos et al, 1997) menyarankan untuk melakukan pelaporan keuangan ke dalam dua bentuk, yaitu laporan keuangan yang lama dalam ukuran moneter ditambah dengan laporan khusus tentang *intellectual capital* dengan ukuran non moneter. Bontis et al (1999) menyatakan bahwa:

*“Adding a flow perspective to the stock perspective is akin to adding a profit and loss statement to a balance sheet in accounting. The two perspectives combined (or the two reporting tools, in the case of accounting) provide much more information than any single one alone. At the same time, intellectual capital flow reporting presents some additional challenges in terms of complexity”.*

Hingga saat ini, badan akuntansi internasional, seperti *International Federation of Accountants (IFAC)*, *International Accounting Standards Committee (IASC)*, *Society of Management Accountants of Canada (SMAC)* juga sedang melakukan pengujian terhadap kerangka kerja pengelolaan dan pelaporan *intellectual capital*.

## 5. Kesimpulan

*Intellectual capital* merupakan sumber daya penting yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pentingnya sumber daya ini

khususnya bagi organisasi sektor publik, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah, regulator, maupun perusahaan untuk mengidentifikasi secara teoritis maupun memberikan solusi praktek sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tidak berwujud, proses maupun potensi yang hingga saat ini tidak dapat ditelusuri oleh ukuran akuntansi tradisional. Meskipun model *intellectual capital* beserta instrumen untuk mengukur dan mengelola aset tidak berwujud telah dikembangkan oleh para peneliti di sektor privat, namun masih terdapat kesulitan untuk mengaplikasikan model *intellectual capital* sektor privat ke sektor publik karena sasaran entitas administrasi publik (memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat dan manajemen yang lebih baik) berbeda dengan sasaran sektor privat (memaksimalkan laba dan menciptakan nilai bagi pemegang saham). Saat ini, yang mungkin untuk dilakukan adalah melakukan pelaporan keuangan ke dalam dua bentuk, yaitu laporan keuangan yang lama dalam ukuran moneter ditambah dengan laporan khusus tentang *intellectual capital* dengan ukuran non moneter sebagai pelengkap laporan tahunan organisasi.

#### **Daftar Pustaka**

- Abeyssekera, I. 2006. "The Project of Intellectual Capital Disclosure: Researching the Research", *Journal of Intellectual Capital*, Vo. 7, No. 1, pp. 61-77.
- Andersen, A. 1998. "Knowledge Measurement, Next Generation Research Group Paper", pp. 99-1029.
- Bontis, N. 2000. "Assessing Knowledge Assets: A Review of The Models Used To Measures Intellectual Capital", <http://www.business.queensu.ca/kbe> diakses tanggal 2 Januari 2012.
- Bontis, N. 2002. "Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital: Framing and Advancing the State of the Field", in Choo, C.W., and Bontis, N. (Eds), 2002. *The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge*, Oxford University Press, Oxford, pp. 621-42.
- Bontis, N., Dragonetti, NC., Jacobsen, K., and Ross, G. 1999. "The Knowledge Toolbox: A Review of The Tools Available to Measures and Manage Intangible Resources". *European Management Journal*. Vol. 17, No. 4, pp. 391-402.
- Bossi, A. 2003. "La Medicion del Capital Intelctual en El Sector Publico", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- Bossi, A., Fuertes, Y., and Serrano, C. 2001. "El Capital Intelctual en El Sector Publico", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vo. 11, No. 2. pp. 248-264.
- Bounfour, A. 2003. *The Management of Intangibles*, Routledge, London.
- Brooking, A. 1996. *Intellectual Capital*, Thomson Learning Europe, Thompson Business Press, London.
- Bueno, E., Merino, C., and Salmador, M.P. 2003. "Towards a Model of Intellectual Capital in Public Administrations", paper presented at 3<sup>rd</sup> *International Conference, Iberosmerican Academy of Management*, Sao Paulo, 7-10 December.

- Bueno, E., Merino, C., and Salmador, M.P. 2004. "La Administracion Publica Como Agente del Conocimiento en La Sociedad de La Informacion. Sistema de Gestion y Desarrollo del Capital Intelectual", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- Caba, C., and Sierra, M. 2001. "Incorporacion de Un Estado Sobre el Capital Intelectual en Los Organismos Publicos", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- Chen, Y.S. 2008. "The Positive Effect of Green Intellectual Capital on Competitive Advantages of Firms", *Journal of Business Ethics*, Vo. 7, No. 3, pp. 271-86.
- Carlin, T.M., Yongvanich, K., and Guthrie, J. 2005. "Public Sector Performance Reporting: the Intellectual Capital Question?", paper presented at 9<sup>th</sup> *International Research Symposium an Public Management*, Bocconi University, Milan, 6-8 April.
- Cinca, C.S., Molinero, C.M., and Queiroz, A.B. 2003. "The Measurement of Intangible Assets in Public Sector Using Scaling Techniques", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 4, No. 2, pp.249-275.
- Del Bello, A. 2006. "Intangibles and Sustainability in Local Government Reports: An Analysis Into an Uneasy Relationship", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 7, No. 4, pp. 440-56.
- Ducharme, L.M. 1998. "Measuring Intangible Investment, Introduction: Main Theories and Concepts", paper presented at the *International Symposium Measuring and reporting Intellectual Capital: Experiences, Issues and Prospects*, OECD, Amsterdam.
- Edvinsson, L., and Malone, MS. 1997. "*Intellectual Capital: Realising your Company's True Value by Finding its Hidden Roots*", Harper Collins, New York, NY.
- Euroforum. 1998. "Medicion del Capital Intelectual, Modelo Intelect", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- European Foundation for Quality Management (EFQM). 1997. "Modelo EFQM de Excelencia Empresarial", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- Financial Accounting Standard Board. 2010. "*Statement of Financial Accounting Concepts No.8, Conceptual Framework For Financial Reporting*", Norwalk, Connecticut.
- Garcia, M. 2001. "La Informacion Contable de Los Activos Intangibles", in Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol, 11, No. 2, pp. 248-264.
- Guthrie, J. and Petty, R. 2000a. "Intellectual Capital Literature Review", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 1, No. 2, pp. 155-76.
- Guthrie, J. and Petty, R. 2000b. "Intellectual Capital: Australiasn Annual Reporting Practices", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 1, No. 3, pp. 241-51.
- Haanes, K., and Lowendahl, B. 1997. "The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm", in Thomas, H et al. (Eds), "*Strategy, Structure and Style*", Wiley, Copenhagen.
- Hodges, R., and Mellet, H. 2002. "Testing the New Public Management: Accounting Regulation Due Process", paper presented at *The European Accounting Association Congress*, Copenhagen.
- Kaufmann, L. and Schneider, Y. 2004. "Intangibles: A Synthesis of Current Research", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 5, No. 3, pp.366-87.
- Kaplan, R., and Norton, D. 1992. "The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance", *Harvard Business Review*, Vol. 70, No. 1, pp. 71-9.

- Kong, E. 2008. "The Development of Strategic Management in the Non-Profit Context: Intellectual Capital in Social Service Non-Profit Organizations", *International Journal of Management Reviews*, Vol. 10, No. 3, pp. 281-99.
- Kong, E. 2009. "Facilitating Learning through Intellectual Capital in Social Service Non-Profit Organisations", *International Journal of Learning*, Vol. 16, No. 2, pp. 533-50.
- Kong, E., and Prior, D. 2008. "An Intellectual Capital Perspective of Competitive Advantage in Non-Profit Organizations", *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, Vol. 13, pp. 119-28.
- Kong, E., and Thomson, S.B. 2006. "Intellectual Capital and Strategic Human Resource Management in Social Service Non-Profit Organisations in Australia", *The International Journal of Human Resource Development and Management*, Vol. 6 Nos 2-4, pp. 213-31.
- Kong, E., and Thompson, S.B. 2009. "An Intellectual Capital Perspective of Human Resource Strategies and Practices", *Knowledge Management Research and Practice*, Vol. 7, No. 4, pp. 356-64.
- Mayo, A. 2000. "The Role of Employee Development in the Growth of Intellectual Capital", *Personnel Review*, Vo. 29, No. 4, pp. 1-9.
- Mouritsen, J., Bukh, P.N., and Bang, H.K. 2005. "Understanding Intellectual Capital in An Innovative Medium-Sized Firm: the Case of Maxon Telecom", *Australian Accounting Review*, Vol. 15, No. 2, pp. 30-9.
- Mouritsen, J., Bukh, PN., Larsen, HT. 2000. "Constructing Intellectual Capital Statements". Denmark.
- Mouritsen, J., Bukh., and Marr, B. 2004. "Reporting on Intellectual Capital: Why, What and How?", *Measuring Business Excellence*, Vol. 8, No. 1, pp. 46-54.
- Mouritsen, J., Larsen, H.T., and Bukh, P.N.D. 2001. "Intellectual Capital and the 'Capable Firm': Narrating, Visualising and Numbering for Managing Knowledge", *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 26, Nos 7/8, pp. 735-62.
- Mouritsen, J., and Thorbjornsen, S. 2004. "Intellectual Capital and New Public Management. Reintroducing Enterprise", *The Learning Organization*, Vol. 11 Nov 4/5, pp. 380-92.
- OECD. 1999. "OECD Symposium on Measuring and Reporting of Intellectual Capital, Amsterdam", Organisation for Economic Cooperation and development, Paris.
- Ramirez, Y. 2010. "Intellectual Capital Models in Spanish Public Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 11, No. 2, pp. 248-264.
- Republik Indonesia. 2010. "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan". Jakarta.
- Rodgers, W. 2003. "Measurement and Reporting of Knowledge-Based Assets", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 4, No. 2, pp. 181-90.
- Roos, J., Roos, G., Dragonetti, NC., and Edvinsson, L. 1997. "Intellectual Capital; Navigating the New Business Landscape", Macmillan Press, London.
- Schneider, A., and Samkin, G. 2008. "Intellectual Capital Reporting by the New Zealand Local Government Sector", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 9, No. 3, pp. 456-486.
- Schiuma, G., and Lerro, A. 2008. "Intellectual Capital and Companies Performance Improvement", *Measurement Business Excellence*, Vol. 12, No. 2, pp. 3-9.
- Serrano, C., Mar, C., and Bossi, A. 2003. "The Measurement of Intangible Assets in Public Sector Using Scalling Techniques", *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 4, No. 2, pp. 249-75.

- Skyrme, and Amidon. 1998. dalam Yudianti, F.R.N. 2000. "Pengungkapan Modal Intelektual untuk Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Pelaporan Keuangan". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 2, No. 3, Desember, pp. 271-283.
- Stewart, T.A. 1997. "*Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations*", Currency Doubleday, New York, NY.
- Sullivan, P.H. 1999. "Profiting from Intellectual Capital", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 3, No.2, pp. 132-43.
- Sveiby, K.E. 1997. "*The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge based Assets*", Berret-Koehler Publisher, Inc., San Fransisco, CA.
- Sveiby, K.E. 1998. "*Intellectual Capital: Thinking Ahead*", Australian CPA, June, pp. 18-21.
- Sveiby, K.E. 2000. "Measuring Intangible Assets-An Emerging Standard", in Cinca, C.S., Molinero, C.M., and Queiroz, A.B. 2003. "The Measurement of Intangible Assets in Public Sector Using Scaling Techniques", *Journal of Intellectual Capital*, Vol 4, No. 2, pp. 249-297.
- Van der Meer-Kooistra, J., and Zilstra, S.M. 2001. "Reporting on Intellectual Capital", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 14, No. 4, pp. 456-76.
- Wall, A. 2005. "The Measurement and Management of Intellectual Capital in the Public Sector. Taking the Lead or Waiting for Direction?", *Public Management Review*, Vol. 7, No. 2, pp. 289-303.



*knowledge for prosperity*

*Proceeding*

# **Seminar Nasional**

## ***Call For Papers***

**“RISET EKONOMI DAN BISNIS INKLUSIF”**

**Sekretariat :**

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami 36A Ketingan Surakarta

Telp : 0271-647481 | Fax : 0271-638143

Email : semnas2013.feuns@gmail.com

*fe.uns.ac.id*

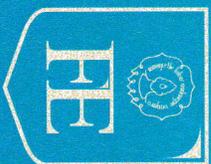
Didukung Oleh:

ISSN :



**Bank  BTN**





*knowledge for prosperity*

fe.uns.ac.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Universitas Sebelas Maret  
**Fakultas Ekonomi**

# Sertifikat

Diberikan Kepada:

**Dr. Ida Ketut Kusumawijaya, SE, MM**

Sebagai

**Pemakalah**

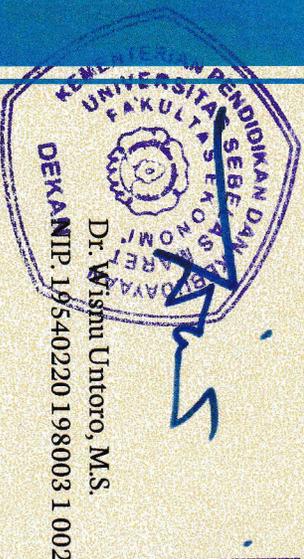
Dalam Acara

**Seminar Nasional dan Call for Papers  
Riset Ekonomi dan Bisnis Inklusif**

Surakarta, 30-31 Mei 2013

Dekan,

Ketua Panitia,



Dr. Wisnu Untoro, M.S.  
DEKAN TIP. 19540220 198003 1 002



Dr. Hunik Sri Runing S, M.Si.  
NIP. 19590403 198601 2 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA



**Pegadaian**

Bank **BTN**